

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI

Ni Luh Putu Wulandari ¹

Made Kembar Sri Budhi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

e-mail: niluhputuwulandari30@gmail.com

ABSTRAK

PAD merupakan tolok ukur untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Untuk meningkatkan PAD ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, inflasi, dan pengeluaran pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dan 2) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dengan menggunakan Teknik analisis Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, 2) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, 3) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali dan 4) Inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, investasi, inflasi.*

ABSTRACT

Regional Original Income is a benchmark for determining the level of regional capacity in implementing regional autonomy in a real and responsible manner. To increase Regional Original Revenue there are several factors that need to be considered including gross regional domestic product, population, inflation, and government expenditure. The objectives to be achieved in this study are: 1) To analyze the effect of Gross Regional Domestic Product, Investment, and Inflation simultaneously on the Regional Income of Bali Province and 2) To analyze the effect of Gross Regional Domestic Product, Investment, and Inflation in partial effect towards the Regional Original Income of Bali by using Multiple Linear Regression analysis techniques. The results of this study state that 1) Gross Regal Domestic Product, Investment, and Inflation simultaneously have a significant effect on Bali Province's Original Revenue, 2) Gross Regional Domestic Product has a positive and significant effect on Bali Provincial Original Income, 3) Investment has a positive effect and significant to Bali Province's Original Revenue and 4) Inflation does not have a positive and significant effect on Bali Province's Original Revenue.

Keywords: *Regional Income, Gross Regional Domestic Product, investment, inflation.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi, salah satunya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aga, 2014). Menurut Resosudarmo (2018), berbagai program efektif untuk meningkatkan modal manusia dan inovasi sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan adanya peranan pemerintah daerah memanfaatkan semua sumber daya secara optimal (Fajrii dkk, 2016). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sari, 2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan kemajuan suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadinya perubahan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan selama periode waktu. Menurut Suartha dan Yasa (2017), pertumbuhan ekonomi akan menciptakan multiplier effect terhadap sendi-sendi kehidupan, seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka pemerintah melaksanakan pembangunan yang merupakan bagian dari terselenggaranya otonomi daerah, dimana otonomi daerah ini memberikan hak wewenang dan kewajiban untuk menjalankan dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan prinsip otonomi daerah (Rosita, 2018).

Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menggali potensi yang dimiliki daerahnya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Salah satu sumber dari penerimaan pemerintahan daerah yaitu pendapatan asli daerah (Sari, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan

tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Schwartz *et.al*, 2010: 21).

Otonomi daerah selain sebagai pemicu dari peningkatan potensi di setiap daerah, otonomi daerah juga merupakan sebuah proses terbentuknya suatu program-program pemerintah melalui desentralisasi yang akan dapat meningkatkan sumber-sumber potensi dari sebuah wilayah (Irawan, 2015). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2012: 45). Beberapa penelitian mengenai desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan gambaran bahwa desentralisasi (otonomi daerah) membawa dampak yang beragam bagi suatu daerah (Kusuma, 2016).

Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk

meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Weisbrod, 2014: 211). Usaha pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Pentingnya peran PAD terhadap kemajuan suatu daerah membuat pemerintah berusaha meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD, selain itu meningkatnya PAD suatu daerah dapat meminimalisir terjadinya kemiskinan (Margareni, 2016). Peningkatan PAD ini dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka akan semakin mandiri suatu daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, maka masing-masing pemerintah daerah saling berlomba untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, begitupula dengan pemerintah daerah Provinsi Bali. Perkembangan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa, pendapatan asli daerah Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 1998 hingga tahun 2017. Pada Tabel 1 menyatakan bahwa Provinsi Bali memiliki PAD yang cenderung meningkat akan tetapi tahun terakhir yaitu tahun 2015 menuju tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya penurunan pajak rokok, terjadi penurunan pada pendapatan lain-lain yaitu pendapatan dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta akibat dari Perda Minuman Beralkohol (Mikol) yang dihapuskan mengakibatkan pajak yang masuk ke PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 1998-2017 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Perkembangan Presentase (%)
1998	81.914.319	-
1999	237.915.032	190,4
2000	316.927.413	33,2
2001	400.437.594	26,3
2002	465.749.519	16,3
2003	382.092.277	-17,9
2004	559.681.558	46,7
2005	742.886.075	32,7
2006	729.338.159	-1,82
2007	834.475.057	14,4
2008	1.055.454.263	26,4
2009	1.163.947.552	10,2
2010	1.393.730.257	19,7
2011	1.723.807.096	23,68
2012	2.042.091.096	18,46
2013	2.529.976.147	23,89
2014	2.920.416.697	15,4
2015	3.041.266.607	4,1
2016	3.041.195.258	-0,002
2017	3.398.472.278	11,74
Total	22.310.157.241	

Sumber :BPS Provinsi Bali, 2018 (data diolah)

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah. Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada undang-undang yang berlaku melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah guna membiayai pembangunan daerah (Nolan, *et.al*, 2014: 5).

Keberhasilan dari suatu pembangunan di suatu wilayah dapat diamati dengan salah satu indikator makro, dimana indikator tersebut salah satunya dapat di analisis melalui PDRB yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu nilai tambah yang

berasal dari kegiatan di suatu daerah. PDRB yang dipengaruhi oleh sektor ekonomi memiliki peran yang sangat penting didalam laju pertumbuhan ekonomi (Suryahadi dkk, 2012). Dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat

Selain PDRB, investasi juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi (Sanjaya, 2018). Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya, pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing (Bhaskara, 2014).

Menurut teori Klasik bahwa investasi merupakan pengeluaran yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang produksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 bahwa Penanaman Modal Domestik (PMDN) berasal dari penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berasal dari penanaman modal asing yang sepenuhnya atau patungan dengan modal dalam negeri. Provinsi Bali memiliki investasi yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Selain PDRB dan investasi komponen penting yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2014: 2). Penelitian Simanjutak dalam Halim (2011: 72) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika

inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap.

Terjaganya inflasi di Provinsi Bali pada tahun-tahun sebelumnya di dukung oleh semakin kuatnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan seperti peningkatan kunjungan wisatawan, sejalan dengan masuknya periode pariwisata, perayaan hari besar keagamaan yang berpotensi mendorong permintaan, ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah lain.

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan sebelumnya, penelitian Triani dan Kuntari (2010: 3) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan PAD Di Kabupaten Karanganyar, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Aryanti dan Indarti (2010) serta Sari (2013) yang menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD di Provinsi Bali. Sedangkan Penelitian Purwaningsih (2010) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sragen.

Meskipun sudah terjaganya PDRB, investasi maupun inflasi Provinsi Bali, pemerintah daerah harus terus menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan asli Provinsi Bali melalui inovasi-inovasi baru di berbagai bidang sehingga nantinya mampu menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang potensial dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam membiayai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini ingin mengkaji sejauh manakah pengaruh PDRB, investasi dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali, mengingat pendapatan melalui komponen PAD cukup baik namun pendapatan asli daerah

Provinsi Bali selalu mengalami fluktuasi di tahun-tahun tertentu. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

METODOLOGI PENULISAN

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk "membuktikan" dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan atau explanatory research, yang akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen tersebut terhadap variabel dependen melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2012 : 98). Lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Provinsi Bali dikarenakan peningkatan persentase kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi seperti terlihat terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 dengan persentase penurunan mencapai -0,002 persen. Selain itu jika dilihat pada tahun 2016 PAD Provinsi Bali terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Alasan lain memilih Provinsi Bali adalah mengingat terjaganya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pada investasi setiap tahunnya serta nilai inflasi yang cukup stabil namun pendapatan asli daerah masih tetap mengalami fluktuasi.

Objek penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali. Jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Sumber data dalam penelitian ini ialah diperoleh dari catatan-

catatan, dokumen-dokumen, ataupun tulisan-tulisan yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses melalui website <https://bali.bps.go.id/> Selain itu sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Sangadji dan Sopiah, 2010:44). Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal, literatur, catatan serta laporan historis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

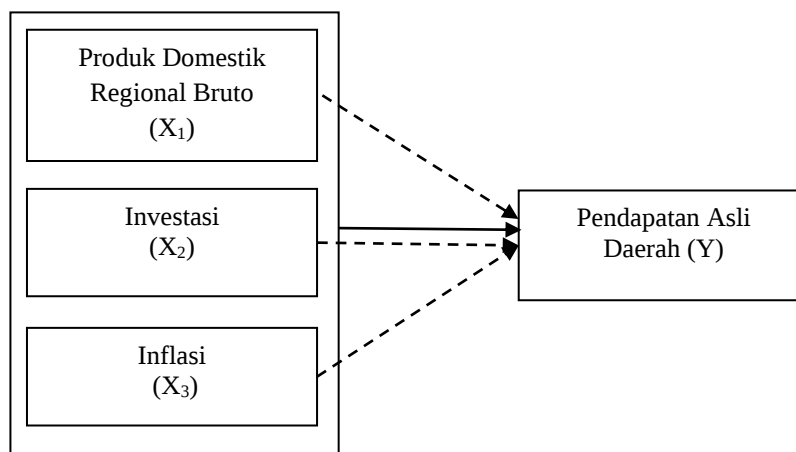
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non-partisipan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari jurnal, buku-buku, dokumen skripsi, tesis, melakukan akses di Badan Pusat Statistik Bali (BPS) serta dalam bentuk runtun waktu (time series). Dimana untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan program SPSS. Persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
X ₁	=	Produk Domestik Regional Bruto
X ₂	=	Investasi
X ₃	=	Inflasi
α	=	Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃	=	Koefisien Regresi Masing-Masing Variabel Independen
μ _i	=	Error

Secara sistematis, desain penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali.

Keterangan: —————> Pengaruh simultan X_1 dan X_2, X_3 terhadap Y

-----> Pengaruh parsial X_1, X_2, X_3 terhadap Y

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Dengan demikian daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Menurut Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur yang diterima, tetapi jua diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya kenaikan PAD.

Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dirangsang dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan menambah investasi. Investasi baru akan menambah stok modal sehingga kemudian akan menambah output nasional. Datrini (2013) juga menyebutkan bahwa peningkatan tabungan dan investasi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Luntungan (2016) mengatakan bahwa pembentukan modal baru/investasi dapat memperbesar kapasitas produksi yang kemudian meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional.

Kegiatan investasi membawa dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kesempatan kerja, pendapatan nasional, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini karena investasi yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan permintaan agregat. Kenaikan dalam permintaan agregat biasanya akan diikuti dengan penambahan kesempatan kerja. Selain itu adanya investasi menambah kapasitas produksi di masa depan (Demirhan dan Mahmut, 2014). Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana

investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat (Anaman, 2014).

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi PMDN maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PAD dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN memiliki hubungan positif terhadap PAD suatu daerah (Suyanto, 2013).

Menurut Case dan Fair (2012) fakta bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi tingkat harga. Ekspektasi bisa menyebabkan kita takut akan perubahan harga. Jika harga naik dan jika ekspektasi masyarakat bersifat adaptif yaitu jika mereka membentuk ekspektasi atas dasar perilaku penetapan harga sebelumnya maka perusahaan mungkin akan terus menaikkan harga meskipun permintaan melambat atau menyusut. Jika bank sentral menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang, para pekerja tidak akan melihat upah riil mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun, dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil (Mankiw, 2012: 47).

Nopirin (2010: 23) pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan yang persentasenya lebih besar dari

laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase yang lebih besar dari pada laju inflasi. adanya serikat buruh yang kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi. dengan demikian inflasi dapat menyebabkan pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Simanjutak dalam Halim (2011: 73) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Jumlah uang beredar menentukan tingkat inflasi, semakin banyak uang yang beredar maka inflasi semakin tinggi. Inflasi dianggap sebagai masalah dalam perekonomian karena menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi sebenarnya tidak ada yang berubah, dengan adanya inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja (Afubero dan Emmanuel, 2014: 27). Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Ketika inflasi melambat perusahaan akan sedikit menaikkan harga produk setiap tahun, yang mengakibatkan pendapatan pengusaha lebih besar dan akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak untuk memberikan potensi penerimaan daerah lebih banyak. Menurut Sarah (2017), upah minimum adalah bidang kebijakan yang kontroversial yang penting untuk pekerjaan, pendapatan, dan insentif untuk memperoleh keterampilan baru. Upah minimum ini juga akan menimbulkan adanya pengangguran. Menurut Seran (2017), faktor penyebab timbulnya pengangguran diantaranya yaitu, pertama, rendahnya tingkat upah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, didapatkan data terkait dari publikasi dan data yang didapatkan dari dinas terkait.

1) Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Bali

Produk domestik regional bruto adalah merupakan nilai seluruh dari barang dan jasa yang di produksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak akan meningkat, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan PAD. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Tabel 2 Nilai PDRB Harga Konstan 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 1998-2017

Tahun	PDRB Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1998	15.772,92	-
1999	17.059,99	8,1
2000	18.051,17	5,8
2001	17.321,90	-4,0
2002	17.437,96	0,7
2003	17.969,82	3,0
2004	18.603,81	3,5
2005	19.167,87	3,0
2006	19.853,64	3,5
2007	20.771,65	4,6
2008	21.926,96	5,6
2009	23.084,30	5,2
2010	23.992,63	3,9
2011	26.433,49	10,2
2012	29.443,59	11,4
2013	33.135,15	12,5
2014	38.096,53	14,9
2015	42.480,42	11,5
2016	46.336,51	9,1
2017	50.714,92	9,4

Sumber : *BPS Provinsi Bali, 2018 (data diolah)*

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 1998 – 2017 Provinsi Bali memiliki nilai PDRB yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat produk domestik regional bruto Provinsi Bali mengalami kenaikan yang signifikan. Peningkatan produk domestik regional bruto di Bali diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang menandakan bahwa pendapatan Provinsi Bali stabil.

2) Perkembangan Inflasi Bali

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2014: 2). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah atau

gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja. Solihin dan Sukartini (2014) mengungkapkan bahwa teori ekonomi neoklasik tentang penawaran tenaga kerja memprediksikan bahwa penawaran tenaga kerja seharusnya meningkat, jika ada peningkatan upah yang bersifat sementara. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Penelitian Simanjutak dalam Halim (2011: 72) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap. Laju inflasi di Provinsi Bali Tahun 1998-2017 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4Laju Inflasi di Provinsi Bali Tahun 1998-2017 (dalam satuan %)

Tahun	Laju Inflasi
1998	75,11
1999	4,39
2000	9,81
2001	11,52
2002	12,49
2003	4,56
2004	5,97
2005	11,31
2006	4,3
2007	5,91
2008	9,62
2009	4,37
2010	8,10
2011	3,75
2012	4,71
2013	7,35
2014	8,03
2015	2,70
2016	2,94
2017	3,31

Sumber: *BPS Provinsi Bali, 2018*

Dari Tabel 4 diketahui bahwa inflasi Bali dari terus berfluktuasi, hal ini karena kondisi inflasi juga berkaitan dengan kondisi perekonomian di luar Bali. Beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi inflasi Bali dapat dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provisni lain di Indonesia. Terjaganya inflasi di Provinsi Bali pada tahun-

tahun sebelumnya dukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3) Perkembangan Investasi Bali

Investasi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi suatu daerah, karena investasi atau penanaman modal menjadi faktor untuk kemajuannya dari daerah tersebut. Investasi merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Tabel 3 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Bali Tahun 1998-2017 (milyar rupiah)

Tahun	PMA	PMDN	Investasi (PMA + PMDN)
1998	71,46	170,49	241,95
1999	110,46	119,95	230,41
2000	16,92	33,5	50,42
2001	51,97	459,22	511,19
2002	80,25	88,52	168,77
2003	16,85	6,99	23,84
2004	11,29	2,59	13,88
2005	359,96	371,15	731,11
2006	47,38	48,67	96,05
2007	59,12	59,14	118,26
2008	488,75	446,47	935,22
2009	403,49	537,65	941,14
2010	297,4	215,65	513,05
2011	389,07	374,99	764,06
2012	128,16	120,84	249,00
2013	4.341,16	2.520,36	6.861,52
2014	800,97	900,48	1.701,45
2015	1.078,77	1.006,36	2.085,13
2016	934,97	493,11	1.428,08
2017	4.963,84	3.959,44	8.923,28

Sumber : *Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, 2018 (data diolah)*

Pada Tabel 3 diketahui bahwa kondisi penanaman modal (investasi) selama periode tahun 1998-2017 lebih stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lonjakan investasi di provinsi Bali yang cukup besar terjadi pada tahun 2013, dimana realisasi investasi

mencapai 6.861,52 miliar rupiah. Namun pada tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2016 investasi di Provinsi Bali sedikit mengalami penurunan. Selain itu jika dilihat pada tabel 4.3 diketahui bahwa investasi yang ada di Bali lebih banyak mengarah kepada investasi asing dibandingkan dengan investasi nasional.

4) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Bali

Provinsi Bali dengan potensi alam dan budayanya, menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sector unggulan. Beberapa kabupaten di Provinsi Bali memperoleh pendapatannya melalui pengelolaan sumberdaya di sektor pariwisata. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu sumber penerimaan rutin dari pemerintah Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali, 2018).

Provinsi Bali merupakan daerah yang yang pendapatannya sebagian besar berasal dari sektor pariwisata sehingga menjadikan pemasukan pendapatan asli daerah provinsi Bali menjadi cukup tinggi, selain itu beberapa penerapan pajak seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak minuman beralkohol juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Landon dan Reid, 2015: 121).

Tabel 5 menunjukan bahwa PAD Provinsi Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan yang menandakan bahwa PAD cukup stabil. Namun pada tahun terakhir yaitu tahun 2015 menuju tahun 2016 PAD Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pengurangan dan penghapusan pajak seperti pajak minuman beralkohol dan pengurangan pajak rokok. Tabel 5 di tampilkan sebagai berikut :

Tabel 5 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 1998-2017 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Perkembangan Presentase (%)
1998	81.914.319	-
1999	237.915.032	190,4
2000	316.927.413	33,2
2001	400.437.594	26,3
2002	465.749.519	16,3
2003	382.092.277	-17,9
2004	559.681.558	46,7
2005	742.886.075	32,7
2006	729.338.159	-1,82
2007	834.475.057	14,4
2008	1.055.454.263	26,4
2009	1.163.947.552	10,2
2010	1.393.730.257	19,7
2011	1.723.807.096	23,68
2012	2.042.091.096	18,46
2013	2.529.976.147	23,89
2014	2.920.416.697	15,4
2015	3.041.266.607	4,1
2016	3.041.195.258	-0,002
2017	3.398.472.278	11,74

Sumber :BPS Provinsi Bali, 2018 (data diolah)

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan agar model regresi yang dijadikan alat estimasi tidak bias. Berikut ini merupakan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu(residual) dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas dengan Metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,160
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,191

Sumber: *Hasil Olahan Data, 2018*

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* pada model regresi adalah 0,160 dengan tingkat signifikansi pada *Asymp.Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,191. Nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5$ persen (0,05). Hal ini menyatakan bahwa data sudah terdistribusi normal atau lulus uji normalitas dan model regresi yang dibuat adalah layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel independen. Model regresi dikatakan bebas multikolinieritas apabila model tersebut mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 10% (0,1) dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi pertama dengan variabel terikat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	0,464	2,157
Investasi (X_2)	0,503	1,989
Inflasi (X_3)	0,892	1,122

Sumber: *Hasil Olahan Data, 2018*

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa semua variabel tidak ada yang mengandung multikolinieritas. Dimana masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10% dan nilai VIF kurang dari 10.

3) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2012: 96). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji *Durbin-Watson* (Uji DW). Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 ^a	.957	.948	333813874.47639	2.243

Sumber: *Hasil Olahan Data, 2018*

Berdasarkan tabel 8 nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,243 dengan pembandingan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel 20 ($n=20$), dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$), maka pada tabel *Durbin-Watson* akan didapat nilai d_U sebesar 1,68. Karena nilai DW 2,243 lebih besar dari batas atas (d_U) 1,68 dan kurang dari $4 - 1,68 = 2,32$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser dengan meregresi variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Hasil Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	0,087
Investasi (X_2)	0,090
Inflasi (X_3)	0,540

Sumber: *Hasil Olahan Data, 2018*

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat signifikan dari variabel bebas pada uji heteroskedastisitas lebih besar dari nilai singnifikansi sebesar 5 persen (0,05) maka tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi (X_1), investasi (X_2), dan inflasi (X_3), terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali (Y). Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menggunakan program *IBMSPSS Statistic 23* dari hasil olahan data, maka didapat persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu i \dots\dots\dots(2)$$

$$Y = -1324178563,164 + 99872,952 X_1 + 195000,680 X_2 - 2985031,726 X_3$$

$$S(\beta) = \quad \quad \quad (10545,660) \quad (46101,753) \quad (5192160,139)$$

$$t = \quad \quad \quad (9,471) \quad (4,230) \quad (-0,575)$$

$$\text{Sig} = \quad \quad \quad (0,000) \quad (0,001) \quad (0,573)$$

$$R^2 = 0,957 \quad \quad F = 117,402 \quad \quad \text{Sig} = 0,000$$

Keterangan:

Y = Pendapatan asli daerah Provinsi Bali

α = Konstanta

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto

X_2 = Investasi

X_3 = Inflasi

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi masing-masing variabel X

μi = error

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil pengolahan, didapatkan nilai *R-Square* sebesar 0,957 atau sebesar 95,7%. Hal tersebut berarti 95,7% variasi (naik turunnya) pendapatan asli daerah (PAD) Provisni Bali dipengaruhi oleh variasi (naik turunnya) produk domestik regional bruto (X_1), investasi

(X_2), dan inflasi (X_3). Dan sisanya sebesar 4,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam permodelan.

Hasil Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap variable-variabel pada data penelitian secara simultan atau serempak dilakukan dengan uji F (F-test). Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

1) Formulasi Hipotesis

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya produk domestik regional bruto, Investasi dan Inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi Bali.

H_1 : paling tidak salah satu dari $\beta_i \neq 0$ ($i = 1, 2, 3$), artinya produk domestik regional bruto, Investasi dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi Bali.

2) Taraf nyata, $\alpha = 5\%$ dengan derajat bebas $Df = (k - 1)$, $(n - k)$ atau $Df = (4 - 1 = 3)$, $(20 - 4 = 16)$ sehingga didapatkan F Tabel sebesar 3,24

3) Kriteria pengujian H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

4) Menentukan besarnya F hitung

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS di dapatkan hasil F hitung sebesar 117,402.

5) Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil F hitung sebesar $117,402 > F_{tabel}$ sebesar 3,24 maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto, investasi dan

inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Bali.

Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

1) Pengujian Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan hasil olahan dengan SPSS, didapatkan nilai $t_{hitung} = 9,471$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Didapat nilai $t_{hitung} = 9,471$ sedangkan $t_{tabel} = 2,120$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini berarti produk domestik regional bruto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali.

Dalam hasil olahan data, diketahui bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan bahwa dengan tersedianya infrastruktur dan prasarana publik yang menunjang perekonomian, peningkatan produk domestik regional bruto dapat memberikan semangat kepada para pelaku usaha sehingga kegiatan perekonomian meningkat dan maksimal yang menyebabkan pendapatan asli daerah menjadi bertambah. Hasil dari penelitian ini juga sejalan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006), Ayu Desmawati dan Sulgani (2015) dan Astryani (2016) yang membuktikan adanya pengaruh positif dari produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut Harianto dan Adi (2007), pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB). Pada tahun 1998-2017, pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali terus mengalami kenaikan khususnya, PDRB Provinsi Bali didominasi oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Seiring dengan perkembangan dan peningkatan PDRB yang didapatkan dari berkembangnya penyediaan

akomodasi dan makan minum juga akan meningkatkan penerimaan PAD terutama penerimaan pajak dan distribusi daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi PAD yang akan diterima oleh Provinsi Bali. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pemetaan sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan, sektor potensial dan sektor-sektor lainnya yang berpeluang dapat meningkatkan PAD serta pemerintah juga harus mengoptimalkan pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor-sektor tersebut.

2) Pengujian Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan hasil olahan dengan SPSS, didapatkan nilai $t_{hitung} = 4,230$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Didapat nilai $t_{hitung} = 4,230$ sedangkan $t_{tabel} = 2,120$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 \leq \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini berarti investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali.

Dari hasil olahan data disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar investasi yang masuk, maka akan menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat. Investasi berpengaruh positif disebabkan karena investasi yang tepat sasaran dan pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah berjalan searah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dalam Tambunan (2003:83) yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan Pendapatan suatu daerah dapat dikatakan kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah. Menurut Jolianis (2012), Ifrizal dan Sulaiman (2014), batik (2013) dan Astryani (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari investasi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini karena seharusnya investasi ada dapat digunakan untuk pembangunan

infrastruktur dan segala hal bagi kesejahteraan masyarakat sehingga akan dapat menyebabkan meningkatkan PAD. Dalam hal ini pemerintah daerah seharusnya dapat menggali potensi serta sumber-sumber potensial yang dapat mendatangkan penerimaan daerahnya, sehingga investasi yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari daerahnya yang pada akhirnya akan dapat memberikan *multiplier effect* seperti meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

3) Pengujian Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan hasil olahan dengan SPSS, didapatkan nilai $t_{hitung} = -0,575$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,573. Didapat nilai $t_{hitung} = -0,575$ sedangkan $t_{tabel} = 2,120$ dan nilai signifikansi sebesar $0,573 > \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, ini berarti bahwa variabel inflasi secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi Bali.

Dari hasil olahan data disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Batik (2013), dimana tidak terdapat pengaruh antara variabel inflasi terhadap PAD. Artinya berapapun besarnya inflasi, tidak akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Aryanti dan Iin (2010) dan Mayza, dkk (2015), dimana inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Besar kecilnya inflasi karena pada dasarnya besarnya tarif yang harus di bayarkan untuk PAD yang bersal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain pada yang sah sudah diatur jelas besarnya pada perundangan-undangan, dengan demikian naik atau turunnya inflasi tidak akan berpengaruh langsung terhadap pajak

yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Hal ini karena besarnya pajak yang harus dibayarkan sudah jelas dan tidak dapat semena-mena dinaikan atau diturunkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 1) Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali; 2) Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali; 3) Investasi berpengaruh secara parsial positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali; dan 4) Inflasi berpengaruh secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah diharapkan tetap memaksimalkan dan mengoptimalkan PAD, karena apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan PAD dengan melakukan intensifikasi pajak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelolaan PAD, memberikan dampak kearah peningkatan PAD, memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional, peningkatan pengawasan dan pengendalian, peningkatan sumber daya manusia pengelolaan PAD dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayarpajak; 2) Pemerintah diharapkan lebih mampu untuk memanfaatkan investasi yang ada, hal ini karena semakin maksimal investasi yang ada dengan diikuti oleh gerakan pemerintah yang selektif maka akan berdampak ke arah peningkatan PAD. Sehingga dengan demikian investasi yang ada dapat memberikan hasil

akan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian dan meningkatkan PAD; dan 3) Melalui otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk membangun daerahnya, pemerintah diharapkan memperhatikan sektor-sektor yang ada di daerah dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di sektor tersebut sehingga akan dapat meningkatkan pajak serta secara langsung akan meningkatkan penerimaan asli daerah.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*. Padang, 23-26 Agustus 2006
- Afubero, Dennis dan Okoye Emmanuel. (2014). The Impact of Taxation on Revenue Generation in Nigeria: A Study of Federal Capital Territory and Selected States. *Internasional Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR)*, 2(2) : 22-47.
- Aga, Ahmed Abdulrahman Khder. (2014). The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Turkey 1980–2012. *International Journal of Economics and Finance*, 6(7) : 71-84.
- Alfaro, Laura, Areendam Chanda., Sebnem Kalemli-Ozcan & Selin Sayek. (2016). *How Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Exploring the Effects of Financial Markets on Linkages*. Society of Economic Dynamics Meetings, 64 (1) : 89-112.
- Anaman, Kwabena A. (2014). Determinants of Economic Growth in Brunei Darussalam. *Journal of Asian Economics*, 15 (4) : 777-796.
- Aryanti, Eni dan Iin Indarti. (2010). Pengaruh Variabel Makro Terhadap pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 Di Kota Semarang. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2000). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- , (2006). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- , (2011). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- , (2017). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- , (2018). *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- Batik, Karlina. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 11 (1) : 115-140

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi dan Inflasi Terhadap[Ni Luh Putu Wulandari, Made Kembar Sri Budhi]

Bhaskara Perwira Jaya, Gde., dan A.A Bagus Putu Widanta. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-jurnal EP Unud*, 3 (5) : 201-208.

Case, Karl E. dan C. Fair Ray. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. (2014). *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.

Datrini, Luh Kade. (2013). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Bali. *Sarathi*. 16 (3)

Fajrii, Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 9 (2), 89-176.

Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: UNDIP.

Hariato, David dan Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *SNA X*.

Ifrizal, Darwanis dan Sulaiman. (2014). Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 3 (8).

Irawan, Andi. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia : Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1): 148-149.

Jolianis. (2012). Analisis Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*. 1 (1)

Koch-Weser, Iacob N. (2013). The Reliability of China's Economic Data: An Analysis of National Output. *U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research Project*.

Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1) : 1-11.

Landon, Stuart and Bradford G. Reid. (2015). The Impact Of The Centralization Of Revenues And Expenditures On Growth, Regional Inequality And Inequality. *Journal Economic and Management*, 1(27) : 686-701.

Lewis, Carol W. and W. Bartley Hildreth, (2012). *Budgeting: Politics and Power*, 2nd ed. New York: Oxford University Press.

Luntungan, A. Y. (2016). Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 1(3) : 29-50.

- Mankiw, N Gregory. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, Djayastra, I Ketut dan Murjana Yasa, I.G.W. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Bali. *PIRAMIDA*, 7 (1) : 101-110.
- Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, I Ketut Djayastra dan Murjana Yasa. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *PIRAMIDA UNUD*, 12(1), 101-110.
- Mayza, Miragustia ,Raja Masbar dan Muhammad Nasir. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3 (1) : 9-16.
- Nolan, Anne, Sarah Barry, Sara Burke dan Steve Thomas. (2014). The impact of the financial crisis on the health system and health in Ireland. *World Health Organization*.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Moneter*. Buku I, Edisi ke-4, Cetakan Kesepuluh,. Yogyakarta: BPFE.
- Osinubi, S. Tokunbo, dan Lloyd A. Amaghionyeodiwe. (2010). Foreign Private Investment and Economic Growth In Nigeria. *Review of Economic and Business Studies (REBS)*, 10(2) : 190-204.
- Purwaningsih, Esti. (2010). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008. *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Reksoprayitno, Soediyono. (2014). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Resosudarmo, B. P., and Abdurrohman. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia ?.*Bulletin of Indonesian Economic Studies*. The Australian National University, 54 (2), 141-164.
- Rosita, Ida Ayu Mega dan I Ketut Sutrisna. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(7) : 1445-1471.
- Sanjaya, Gede Putra dan I Nyoman Mahaendra Yasa. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal EP Unud*, 7(5) : 928-954.
- Saragih, Juli Panglima. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarah Xue Dong and Chris Manning. (2017). Labour-Market Developments at a The Australian National University, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.53 (1), 1–25.Time of Heightened Uncertainty.
- Sari, Putu Lia P. (2013). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi dan Humanika*, 3(11) : 530-539.
- Sari, Sagung Istri Permata dan Yuliarmi, Ni Nyoman. (2018). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal, Tingkat Hunian, Dan Jumlah Objek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 7(6) : 1282-1310.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi dan Inflasi Terhadap[Ni Luh Putu Wulandari, Made Kembar Sri Budhi]

Schwartz, J. Brad, Rachel Racelis dan David K. Guilkey. (2010). Decentralization and Local Government Health Expenditures in the Philippines. *Working Paper The Measure Project Carolina Population Center*.

Seran, Sirilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, 10 (2), 59-71.

Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi di Indonesia*.

Solihin, Achmad dan Ni Made Sukartini. (2014). Hubungan Upah dan Penawaran Tenaga Kerja Supir Taxi di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 7 (1), 60-72.

Suartha, Nyoman dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10 (2), 95-107.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sukirno, Sadono. (2014). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suryahadi, Asep, Gracia Hadiwidjaja, and Sudarmono Sumarto. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After The Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesia Economic Studies (BIES)*, 93 (1) : 137-151.

Suyanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasiumum, Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*, 1(2) : 1-7.

Trimurti, Christimulia Purnama, Made Sukarsa, Made Kembar Sri Budhi dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2015). Determinants And The Impact Foreign Investment To Economic Growth And Unemployment In Java-Bali Region. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. 6 (5) : 69-74.

Weisbrod, Glen dan Burton Weisbrod. (2014). Measuring Economic Impacts of Projects and Programs. *Economic Development Research Group*.

Yanthi, Cokorda Istri Dian Purnama dan Marhaeni. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *PIRAMIDA UNUD*, 10(2), 68-75.

Yudistria, Yuyus. (2014). GDP, Labor and Investment Towards Employment In West Java. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Paper ID : Nov161105.